

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Republik Turki adalah sebuah negara dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern.

Ibu kotanya berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Sejak didirikan tahun 1923, Turki menyatakan diri sebagai negara sekuler. Pilihan untuk menjadi negara sekuler ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa unik di tengah hegemoni konservatisme agama masyarakat Muslim dunia. Turki, merupakan bekas pusat pemerintahan dunia Islam, dan satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Islam yang menyatakan diri sebagai negara sekuler.

Semua yang terjadi di Turki menarik untuk diamati, terutama perkembangan politik Turki akhir-akhir ini terus memanas. <sup>1</sup>Tekanan dan himpitan tak selamanya berbuah penderitaan. Bahkan biasanya, justru sebaliknya. Itulah yang terjadi di Turki. Baru-baru ini, AKP, "Partai Keadilan dan

---

<sup>1</sup> Suara Hidayatullah/September 2007, hal 36

Pembangunan” pimpinan Recep Tayyib Erdogan, Sebuah partai berbasis islam memenangkan Pemilu. Hal itu sangat menarik mengingat bertahun-tahun lamanya Turki dikuasai pemerintahan sekuler yang didukung militer.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan AKP, "Partai Keadilan dan Pembangunan" yang berbasis Islam memenangkan pemilu 2007 Turki yang merupakan Negara Sekuler.
2. Menjelaskan secara objektif perkembangan situasi politik di Turki

## **C. Latar Belakang Masalah**

Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia,

Ibu kotanya berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh.

Kekaisaran Turki Ottonom, (Turki Ustmani ) didirikan oleh Bani Utsman, yang selama lebih dari enam abad kekuasaannya(1299-1923) dipimpin oleh delapan orang sultan. Pada puncak kekuasaannya, Kesultanan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 propinsi dengan konstatinopel ( sekarang Istanbul) sebagai ibu kotanya. Pada abad ke-16 dan abad ke- 17, kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat.

Politik dalam negeri di sini, maksudnya adalah penerapan hukum-hukum Islam oleh negara di dalam negeri, ketika negara menerapkan hukum-hukum Islam di dalam wilayah yang tunduk di bawah kekuasaannya; mengatur muamalah, menegakkan hudûd, menerapkan sanksi hukum, menjaga akhlak, menjamin pelaksanaan syiar-syiar dan ibadah, serta mengurus seluruh urusan rakyat sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Dalam hal ini, ada dua faktor utama yang menyebabkan kemunduran Khilafah Utsmaniah. Pertama, faktor buruknya pemahaman Islam. Kedua, faktor kesalahan dalam menerapkan Islam. Sebenarnya, buruknya pemahaman dan kesalahan dalam menerapkan Islam ini bisa diperbaiki ketika Khilafah Utsmaniah

dipegang oleh orang yang kuat dengan keimanannya yang tinggi, namun sayangnya kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik.<sup>2</sup>

Sulaiman, yang dijuluki al-Qânûni, karena jasanya mengadopsi undang-undang (al-qânûn) sebagai sistem yang diterapkan dalam Khilafah Utsmaniah, yang ketika itu juga seorang khalifah yang sangat kuat, justru menyusun undang-undang berdasarkan mazhab tertentu, yaitu mazhab Hanafi, dengan kitab Multaqâ al-Abhur (Pertemuan Berbagai Lautan)-nya yang ditulis Ibrahim al-Halabi (1549 M). Padahal, Khilafah Islam bukanlah negara mazhab.

Dengan kata lain, semua mazhab Islam seharusnya mempunyai tempat di dalam negara dan bukan hanya satu mazhab. Dengan tidak dimanfaatkannya kesempatan emas ini untuk melakukan perbaikan, pemahaman Islam yang buruk dan penerapan Islam yang salah selama ini tidak pernah diperbaiki. Sebagai contoh, dengan diadopsinya undang-undang oleh Sultan Sulaiman, seharusnya penyimpangan dalam pengangkatan khalifah bisa dihindari, namun justru kasus ini tampak tak tersentuh oleh undang-undang. Dampaknya, setelah berakhirnya kekuasaan Sulaiman al-Qanuni, yang diangkat menjadi khalifah justru orang-orang yang tidak mempunyai kelayakan, atau lemah

Kekuatan Kesultanan Usmaniyah terkikis secara perlahan-lahan pada abad ke-19, sampai akhirnya benar-benar runtuh pada abad 20. Setelah berakhirnya Perang Dunia 1, pemerintahan Utsmaniyah yang menerima kekalahan dalam perang tersebut, mengalami kemunduran ekonomi dan akhirnya benar-benar runtuh terpecah pecah menjadi Negara-negara kecil.

---

<sup>2</sup> [http://swaramuslim.net/islam/printerfriendly.php?id=830\\_0\\_4\\_0\\_C](http://swaramuslim.net/islam/printerfriendly.php?id=830_0_4_0_C)

Semenjak Kerajaan Ottonom mengalami kemunduran dan kekalahan yang dialamatkan kesalahannya pada keberadaan Turki sebagai kerajaan Islam. Tahun 1924 Ataturk mengumumkan penghapusan lembaga khilafah dan menyatakan pemisahan urusan agama dari Negara dan Kemudian Turki diputusan menjadi negara sekuler kelompok Nasionalis-Westernis di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha (Kemal Ataturk) berhasil mengambil alih kekuasaan (1923), imperium Ustmani langsung melepaskan baju Islam dan memilih sekulerisme dengan membentuk Republik Turki

Mustafa Kemal Atatürk sendiri sebelum menjadi bapak pendiri Turki modern, dikenal sebagai seorang perwira militer yang disegani. Pada masa-masa awal melakukan sekularisasi ia tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, terutama sisa-sisa kekuatan Turki Utsmani. Hal tersebut secara tidak langsung telah menempatkan militer sebagai peran sentral dalam menjalankan ideologi Kemalisme. Dalam konteks itu, militer Turki memiliki karakter sebagai tentara politik. Dengan dukungan militer dan Barat, "wajah Islam" berusaha dihapuskan dari hati dan kehidupan rakyat Turki.<sup>3</sup>

Ataturk telah memindahkan ibu Negara Turki dari Istanbul ke Angora yang kini dikenal sebagai Ankara. Ia juga yang telah membentuk semua aspek kehidupan Rakyat Turki agar sesuai dengan tuntutan semasa yang kemudian dipanggil ideology kemalist. Ideologi ini bertujuan mengubah Turki ke arah Negara modern, demokratik, dan nagara sekuler, positif dan bertindak rasional.

Secara resmi sekulerisme menjadi ideologi negara. Semua simbol Islam dilarang, penggunaan bahasa dan tulisan Arab diganti huruf Latin, sekolah-sekolah agama dihapus. Dakwah diawasi, Pemerintah Turki juga tidak mengizinkan warganya menjalankan sejumlah kewajiban agama mereka, termasuk melarang wanita memakai hijab di lingkungan kantor, sekolah dan universitas. Bahkan adzan hampir dilarang. Tahun 1925 Attaturk melarang tarekat dan pergi haji. Pendidikan agama amat dibatasi. Pengadilan agama ditutup, hukum pernikahan Islam diganti dengan hukum positif Swedia.

Kuatnya dominasi militer dalam politik Turki Pada era tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an, disebut masa perjuangan kekuatan Islam. Partai yang menentang sekularisme makin besar jumlah pendukungnya meski pembubaran partai-partai islam terus terjadi. Namun, kaum Islamis selalu bersikap demokratis menghadapi keputusan pembubaran partai-partai Islam oleh lembaga militer.<sup>4</sup>

Tahun 1995 Partai Islam Refah menang dan Erbakan menjadi PM. Jargon politik Partai Refah menonjolkan etika, tradisi, keadilan sosial, dan menolakwesternisasi. Refah memperjuangkan Islam model khas Turki sesuai dengan aspirasi massa Islam. Refah bukan partai Islam militan atau fundamentalis, tetapi partai moderat yang menjunjung nilai demokrasi dan pluralisme. Namun, tahun 1997 Turki melalui tangan militer melarang partai itu ketika dianggap Partai Refah terlalu memperjuangkan Islam.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Turki melarang partai Islam Fadilah (Virtue Party) yang menguasai 102 dari 550 kursi parlemen, melakukan

<sup>4</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/28/ln/3714592.htm>

aktivitasnya, merupakan bagian dari pertarungan panjang Atatürkisme dan Islamisme sejak diproklamasikannya negara Turki modern tahun 1923 yang menganut paham sekuler oleh Mustafa Kemal Atatürk. Keputusan itu mencakup pengusiran dua pimpinan Partai Fadilah dari keanggotaan parlemen, dan tiga pimpinan lainnya dilarang melakukan aktivitas politik selama lima tahun.

Dalil keputusan tersebut adalah Partai Fadilah melakukan aktivitas kontrakonstitusi negara Turki modern yang berbasis pada ideologi Kemal Atatürk dengan sendi paham sekularisme. Hilangnya partai Islam Fadilah dari pentas politik Turki saat ini, memperpanjang catatan sejarah partai Islam di negara tersebut yang dilarang melakukan aktivitas oleh Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 1962 itu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tersebut melarang aktivitas partai Islam Refah pimpinan mantan PM Necmettin Erbakan pada tahun 1998, dan partai Penyelamat Nasional yang juga dipimpin Erbakan pada awal tahun 1980-an.

Partai Fadilah (FP), yang dilarang aktivitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan partai politik peraih suara terbesar ketiga pada pemilu 1999, setelah Partai Kiri Demokrat (DSP) dan Partai Aksi Demokrasi (MHP). FP pimpinan Recai Kutan meraih 15,41 persen suara atau 102 dari 550 kursi parlemen. Sedang DSP pimpinan PM Bulent Ecevit meraih 21,71 persen atau 136 kursi parlemen, dan MHP pimpinan Devlet Bahçeli memperoleh suara 18,03 persen atau 128 kursi parlemen.

Ironinya, gerakan Atatürkisme dalam menindas lawan-lawan

tengah diwarnai oleh gegap-gempitanya trend nilai-nilai universal yang sarat nuansa humanisme semacam HAM, demokrasi, dan pemberdayaan *civil society*.

Tak pelak lagi, keputusan Mahkamah Konstitusi Turki tersebut mengundang kritik, baik dari komunitas politik Turki sendiri maupun masyarakat internasional. Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi Turki itu yang dianggap bertentangan dengan parameter demokrasi yang diterima masyarakat internasional saat ini.

Pilihan raya Umum Turki yang ke-16 dimajukan pada hari Ahad, 22 Juli 2007 yang diadakan untuk memilih Presiden Republik Turki ke-11. Sebelum ini Presiden Turki adalah Ahmet Necdet Sezer yang berasal dari kubu sekuler. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berbasis Islam pimpinan Recep Tayyip Erdogan memenangkan Pemilu.

AKP meraih 46,7 persen suara (340 dari 550 kursi parlemen), disusul Partai Rakyat Republik (CHP) yang berbasis sekuler 20,9 persen (113 kursi), kemudian Partai Aksi Nasionalis (MHP) yang berbasis nasionalis sekuler 14,3 persen (70 kursi), dan kubu independent 5,1 persen (27 kursi). Kemenangan sayap Islam ini mengejutkan negara yang berpenduduk 98 persen muslim ini.

Maka lengkap sudah dominasi partai Islam itu di dalam sistem politik Turki, setelah Perdana Menteri, Ketua Parlemen, Wali Kota Sampai Presiden dipegang oleh kader AKP . Itu berarti , setelah 84 tahun disingkirkan Attaturk dari percaturan politik, kini Islam telah kembali

menunjukkan "hati" rakyat Turki adalah Islam. Sebelum AKP menang mutlak, perkembangan gerakan Islam di Negara ini digambarkan bergerak cepat. Selama empat tahun terakhir, setelah partai ini terbentuk, kecenderungan berjilbab dikalangan perempuan Turki mencapai 60 persen. Meski demikian, AKP menyadari kemenangan ini bisa diambil paksa bahkan dengan kasar sewaktu-waktu, sebagaimana dilakukan Barat saat Islam menang secara fair.

Sebab, belum lama ini, kubu sekuler Turki yang didukung sejumlah jendral dan kalangan militer yang selama ini dikenal pendukung utama sekulerisme Turki mengaku terancam jika Islam menang. Militer bahkan pernah mengerahkan jutaan orang turun ke jalan menolak Islam dan ingin mempertahankan sekulerismenya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berusaha mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

***Faktor-faktor apa yang menyebabkan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) yang berbasis Islam memenangkan pemilu Turki Tahun 2007 yang notabene adalah Negara sekuler ?***

#### **E. Kerangka Dasar Teoritik**

##### **1. Konsep Partai Politik**

Konsep Partai Politik menurut *Gabriel A Almond* adalah merupakan sekelompok warga Negara yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya( anggota-anggota dari kelompok yang telah terorganisir itu)

memiliki cita-cita, tujuan tujuan dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan, dan kemudian berusaha untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya(kebijaksanaan kelompok) dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya di dalam jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan. Mengenai cara-cara yang dipergunakan partai politik agar dapat memperoleh kekuasaan tadi dan kemudian menduduki jabatan-jabatan politik ataupun pemerintah adalah dengan melalui (biasanya) cara yang konstitusional, seperti ikut serta di dalam pemilihan umum : maupun melalui ( jarang sekali terjadi ) cara yang konstitusional, seperti mengadakan pemberontakan.

Perlu pula mendapat perhatian bahwa partai politik tidak begitu mudah untuk dibedakan dengan kelompok kepentingan yang terorganisir secara rapi. Walaupun diantara keduanya tidak mudah dibedakan, namun terdapat satu perbedaan yang nampaknya secara umum dapat diterima. Suatu kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar berusaha untuk menguasai jabatan-jabatan public.<sup>5</sup>

#### Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus mempertimbangkan kelompok-kelompok yang terdapat didalamnya dan tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Fungsi partai politik antara lain yaitu:

---

<sup>5</sup> Haryanto, *SISTEM POLITIK: SUATU PENGANTAR*, Liberty, Yogyakarta, 1982 hal 86

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
2. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
3. Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan
4. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan.
5. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Cara atau prosedur yang lazim ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan – kepentingannya adalah dengan cara mengartikulasikan atau mengemukakan kepentingan – kepentingan tersebut kepada badan – badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan – keputusan atau kebijaksanaan – kebijaksanaan.

Kepentingan – kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan atau dikemukakan oleh berbagai macam lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga, badan-badan, ataupun kelompok-kelompok yang mengartikulasikan atau mengemukakan kepentingan - kepentingan masyarakat tadi dapat terwujud lembaga - lembaga, badan -badan ataupun kelompok -kelompok yang dibentuk oleh pihak swasta (masyarakat sendiri) maupun yang dibentuk oleh pihak pemerintah. Hal yang seperti ini tiudaklah menjadi masalah, yang penting untuk mendapat perhatian didalam hal ini adalah fungsi yang dilakukan oleh lembaga- lembaga, badan - badan atau kelompok- kelompok itu dalam mengartikulasikan atau mengemukakan

kepentingan- kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Artikulasi kepentingan sendiri berarti proses untuk mengolah dan kemudian merumuskan pendapat, aspirasi maupun tuntutan pada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan dukungan.

Keikutsertaan AKP dalam pemilu Turki 2007 merupakan cara patraipolitik( AKP ) agar dapat memperoleh kekuasaan menduduki jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan. Kemenangan pemilu kali ini didominasi partai Islam( AKP) di dalam sistem politik Turki. Perdana Menteri dipegang Recep Tayyip Erdogan yang merupakan pendiri dan pemimpin puncak AKP. Ketua Parlemen, Bulen Arinc, juga berasal dari AKP. Lalu hampir seluruh kursi walikota disapu kader AKP, yang selalu menang dalam berbagai Pilkada. Dan kedudukan Presiden pun sudah berada di tangan Abdullah Gul yang merupakan anak emas AKP. AKP telah mengartikulasikan kepentingan rakyat dengan meningkatkan perekonomian sehingga AKP dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat Turki.

## **2. Konsep Legitimasi**

Legitimasi dapat diartikan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan artinya, Apakah masyarakat menerima atau mengakui hak moral pemimpin untuk membuat atau melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atautidak. Apabila masyarakat menerima atau mengakui hak

---

<sup>6</sup> ibid., hal 48

moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan berlegitimasi, maksudnya legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.<sup>7</sup>

Cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. *Symbolis*, memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan serta nilai nilai budaya pada umumnya dalam bentuk symbol-simbol, penggunaan symbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi cenderung bersifat ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar. Contohnya: upacara kenegaraan yang megah, parade militer, penganugerahan tanda-tanda kehormatan dan penghargaan, dan lain-lain.
2. *Prosedural*, dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi Negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum, Penggunaan metode prosedural atau pemilihan umum berlangsung mulai dari calon bersaing bebas, dan mulai dari yang bersifat umum, langsung rahasia serta jujur dan adil (*fair*) sampai penuh dengan manipulasi dan intimidasi. Bagi sementara sistem politik, penyelenggaraan pemilihan umum dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahannya memiliki legitimasi,
3. *Materiil*, dengan cara menjanjikan dan memberikqan kesejahteraan materiil, kepada masyarakat seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*),

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta 1992, hal 92

fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan modal memadai.

Partai AKP telah mendapat legitimasi dari rakyat Turki, hal ini dapat dibuktikan dari rakyat Turki yang mau mengakui dan menerima hak moral pemimpin(Recep Tayyip Erdogan) untuk membuat dan melaksanakan kaputusan yang mengikat masyarakat. Untuk memperoleh waktu agar rakyat menerima legitimasi tersebut, dari kedua cara yakni secara procedural dan secara materiil. Cara prosedural, Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Recep Tayyip Erdogan yang mencalonkan Abdullah Gul sebagai presiden sudah dapat dianggap cukup untuk menunjukkan AKP memiliki legitimasi. Sedangkan secara materiil hamper semua pemimpin yang akan atau sedang berkuasa menggunakan cara ini untuk membangun legitimasi dari masyarakat. Begitu pula dengan kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gul yang merupakan kader dari AKP, meningkatkan kesejahteraan materiil masyarakat Turki menjadi bagian dari agendanya

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan dasr pemikiran diatas, dapat diketahui jawaban sementara bahwa kemenangan partai keadilan dan pembangunan sebuah partai yang berbasis islam ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Keberhasilan PM Recep Tayyip Erdogan, yang juga politisi AKP dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Turki sekitar

sekuler dan tentara (militer) yang menguasai negeri itu, dalam meningkatkan kemakmuran rakyat Turki.

2. Fokus kepemimpinan Abdullah Gul dan PM Recep Tayyip Erdogan dalam upaya-upaya diplomasi internasional guna mengintegrasikan Turki menjadi anggota Uni Eropa (UE).

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif kuantitatif maupun kualitatif yaitu menggambarkan kemenangan AKP, "Partai Keadilan dan Pembangunan.sehingga memenangkan pemilu di Turki Tahun 2007. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku diasmati, sedangkan penelitian kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Penulis perlu menggabungkan dua jenis penelitian ini dikarenakan diperlukannya data-data kuantitatif untuk menunjang dalam mendiskripsikan permasalahan yang ada, dan sebagai bukti kuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **2. Data dan jenis**

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi keperpustakaan yang bersumber dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan searching diberbagai website di internet.<sup>8</sup>

### H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini menggunakan jangkauan sekitar tahun 1990an yang merupakan tahun terbentuknya AKP sampai tahun 2007 yang merupakan tahun kemenangan AKP dalam pemilu Turki dan tidak menutup kemungkinan diluar tahun tersebut.

### I. Sistematika Penulisan :

- Bab I Berisi Pendahuluan yang meliputi, alasan penulisan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teoritik, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan
- Bab II Berisi tentang Dinamika politik Turki.yang meliputi Gambaran Umum Turki,Sistem pemerintahan Turki, Sistem Politik Turki, dan sistem pemilu Turki.

---

<sup>8</sup> Suharsono, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996, hal 47.

- Bab III** Berisi tentang Kemenangan AKP "Partai Keadilan dan Pembangunan",  
Sejarah Partai AKP, Pencapaian AKP "partai Keadilan dan  
Pembangunan" . Krisis Politik dan Gambaran Umum Pemilu Turki  
tahun 2007.
- Bab IV** Berisi tentang Faktor-faktor penyebab kemenangan AKP, "Partai  
Keadilan dan Pembangunan" dalam pemilu Turki 2007.
- Bab V** Kesimpulan